PELAYANAN POS PELAYAN TERPADU DESA BAKUNGTEMNGGUNGAN KEC. BALONGBENDO KAB. SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR DI ERA PANDEMI

¹ Novia Dia Kumala, ²Sukma Asmaning Putri, ³Efa Rohmatin Febriani, ⁴Ananta Prathama

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Prathama.ananta@gmail.com

Surabaya, 60294, Indonesia

Abstract

This research discusses the impact of posyandu services in the era of the Covid-19 pandemic for the community in Bakung Village, Temanggung, Kec. Balongbendo. Where the available services are divided into 3 groups, namely, services for toddlers, pregnant women and the elderly. The purpose of this study was to determine the impact of obstruction of posyandu services for the community caused by the Covid-19 pandemic. To obtain complete data, researchers used qualitative research methods with data collection techniques through observation and interviews. The theory used in this research is descriptive qualitative with hypotheses used subjectively to describe general information. The last stage, draw conclusions by looking for the relationship between the information that has been collected. The results of this study are expected to broaden readers' insights about public services, but it is also hoped that this research can be a reference source for further researchers and as an evaluation material for integrated services in order to further improve the service system during this pandemic and in the future.

Keywords: Covid-19; Impact; public services; posyandu

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang dampak pelayanan posyandu di era pandemi Covid-19 bagi masyarakat di Desa Bakung Temanggung Kec. Balongbendo. Dimana pelayanan yang tersedia dibagi menjadi 3 golongan yaitu, pelayanan balita, ibu hamil dan lansia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak dari terhambatnya pelayanan posyandu untuk masyarakat yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Untuk mendapatkan data secara lengkap, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan hipotesis yang digunakan secara subjektif untuk menggambarkan informasi secara umum. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan dengan mencari hubungan antara informasi yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan pembaca tentang pelayanan publik, selain itu juga diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk peneliti selanjutnya dan sebagai bahan evaluasi untuk pelayanan terpadu agar lebih memperbaiki sistem pelayanan dimasa pandemi ini dan kedepannya.

Kata Kunci: Covid-19; dampak; pelayanan publik; posyandu

PENDAHULUAN

Severe Acute Respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Atau di sebut Covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan dan terkonfirmasi sebagai penyakit yang menular oleh WHO. Virus Covid-19 ini pertama kali di temukan di kota Wuhan, China dimana setelah itu virus ini terus menyebar hingga ke berbagai belahan dunia, hampir semua negara di dunia terkena dampak dari virus ini, bahkan hingga saat ini virus Covid-19 yang menyebar di hampir seluruh negara masih menjadi pandemi di seluruh dunia karena banyaknya korban meninggal akibat virus ini.

Saat ini masih banyak masyarakat yang terpapar virus Covid-19 ini. Tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat di dunia namun dampaknya juga sangat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan salah satunya adalah kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan seperti pemenuhan kebutuhan pelayanan penduduk yang melalui barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di setiap institusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, peraturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar dapat terwujudnya system pelayanan yang sesuai dengan asas-asas badan penyelenggara yang baik.

Pada proses pelayanan publik pasti identik dengan banyaknya kerumunan dan inilah yang menjadi masalah di era pandemi Covid-19 ini. Karena virus Covid-19 sudah terkonfirmasi sebagai penyakit yang menular, kerumunan dapat berpotensi menularkan virus. Semenjak saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial atau yang sering dikenal sebagai *social distancing* dan pembatasan fisik yang biasa dikenal sebagai *physical distancing* atau secara informal disebut sebagai jaga jarak yang merupakan beberapa tindakan intervensi non farmasi yang dimaksudkan untuk mencegah sebuah penyebaran penyakit atau virus yang dapat menulari orang lain dengan menjaga jarak antara satu orang dengan orang lainnya serta mengurangi kapasitas orang yang melakukan sebuah kontak dekat satu sama lain dan menghindari berkumpul bersama dalam kelompok besar. Pemerintah juga memberlakukan kebijakan untuk mewajibkan semua sektor publik dan masyarakat untuk mematuhi perintah untuk menjalankan protokol kesehatan dengan beberapa cara dan salah satunya adalah dengan cara memakai masker, selalu cuci tangan dan untuk tempat publik diwajibkan menyediakan tempat cuci tangan, memakai handsanitizer dan menggunakan pengecek suhu badan untuk memastikan orang tersebut aman dari Covid-19 serta mewajibkan membawa surat keterangan bebas Covid-19 sebagai salah satu persyaratan jika ingin pergi keluar kota dan memakai transportasi umum.

Semenjak diberlakukannya pembatasan sosial di tempat-tempat publik banyak kegiatan pelayanan publik yang sempat terkendala bahkan terhenti, Salah satunya ada pada Pos Pelayanan Terpadu atau yang sering di sebut Posyandu di Desa Bakung temenggung Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang sedang dikelola dan sedang diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam menyelenggarakan sebuah pembangunan kesehatan untuk memberdayakan masyarakat dan juga memberuikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh sebuah pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Posyandu terintegrasi sebagai sebuah kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan tumbuk kembang anak. dalam pelaksanaannya yang dilakukan secara terkoordinir dan integratif serta saling memperkuat sebuah program pelayanan dan kegiatan demi kelangsungan di posyandu yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan lokal yang kegiatannya tetap memperhatikan beberapa aspek pemberdayaan masyarakat. Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang sengaja dibentuk melalui musyawarah mufakat di sebuah desa ataupun kelurahan dan dikelola oleh masyarakat yang dikukuhkan dengan keputusan kepala desa. Ada banyak manfaat dari adanya posyandu seperti mendukung perbaikan perilaku, suatu keadaan gizi dan kesehatan keluarga, mendukung masyarakat untuk perilaku hidup sehat, mendukung kegiatan pencegahan penyakit/ virus yang berasal dari lingkungan dan penyakit yang dapat dicegah dengan cara imunisasi, mendukung pemberdayaan keluarga dan juga masyarakat dalam aneka ragam pangan melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk memotivasi sebuah kelompok dasawisma berperan aktif, Namun dimasa pandemi ini justru masyarakat merasa takut untuk datang ke posyandu karena beberapa masyarakat berspekulasi akan terpapar Virus Covid-19 jika mendatangi tempat-tempat kesehatan yang salah satunya adalah posyandu hal itu pun menyebabkan beberapa dampak bagi masyarakat, seperti kesehatan bayi yang menurun karena tidak di imunisasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu penelitian berikut dilakukan untuk menjelaskan dampak yang di akibatkan oleh pandemi Covid-19 ini terhadap pelayanan pada Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu di Desa Bakung temenggung Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur.

KAJIAN LITERATUR

Pelayanan Publik

(Muhammad Fitri Rahmadana, 2020) Dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu pemerintah yang dekat dan mengayomi masyarakatnya dalam memberi sebuah layanan yang harus sesuai dengan apa yang kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menerangkan bahwa

pelayanan publik adalah suatu perundang undangan yang mengatur tentang bagaimana negara memberi fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar kepada warga negara dan penduduk meliputi barang dan jasa serta pelayanan administratif yang dilaksanakan oleh seseorang yang menyelenggarakan pelayanan publik tersebut .

Dan dapat disimpulkan yaitu pelayanan publik yang ditujukan untuk masyarakat adalah sebuah bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah dalam bentuk barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi beberapa kebutuhan masyarakat dengan tujuan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berpegang teguh pada asas dan prinsip sebuah pelayanan publik.

(Ibrahim, 2019) menjelaskan pelayanan publik yaitu suatu bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk suatu barang publik maupun suatu jasa yang mempunyai prinsip menjadi sebuah tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh sebuah instansi pemerintah di pusat. Pelayanan publik juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang diadakan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan suatu peraturan perundang undangan bagi setiap masyarakat atau warga negara dan penduduk atas sebuah barang, jasa maupun pelayanan administratif yang akan diselenggarakan di setiap instansi penyelenggaraan negara korporaso, lembaga independen yang didirikan berdasarkan peraturan perundang undangan kegiatan pelayanan publik, dan juga badan hukum yang lainnya, yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.

(Maryam, 2016) Menjelaskan definisi pelayanan publik yaitu sebuah pemberian jasa kepada masyarakat, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Rober (1996:30) juga menjelaskan maksud dari pelayanan publik yaitu "segala bentuk aktivitas pelayanan yang telah dilakukan oleh sebuah instansi pemerintahan pusat, di suatu daerah dan di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah yang berupa barang ataupun jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban – ketertiban.

Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 yang menjabarkan tentang pelayanan publik yaitu sebagai berikut " pelayanan publik ialah suatu aktivitas maupun kegiatan dalam rangka dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang disediakan oleh pelayanan penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Dwiyanto (2006:56) yang dikutip dari La Ode Muhammad Elwan. (2019) bahwa pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari

masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparaturnegara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan formal dianggap telah memenuhi sendi-sendi pelayanan yang baik dan aparat pelayanan dianggap telah konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan. (Muhammad Elwan, 2019)

Konsep Kesehatan

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang diasanya disebut dengan (WHO) menjelaskan bahwa kesehatan yaitu suatu keadaan fisik, mental, serta keadaan sosial kesejahteraan dan bukan hanya tidak adaan penyakit atau kelemahan. Pengertian lain dari kesehatan secara luas yaitu tidak hanya berisi tentang aspek medis saja, melainkan juga aspek dari mental dan sosial, bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari sebuah penyakit, atau kelemahan serta cacat saja. Sedangkan menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 1992 menjelaskan kesehatan adalah suatu keadaan dimana sejahtera dari badan, jiwa serta sosial yang memungkinkan bahwa semua orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kualitas layanan kesehatan ditentukan oleh berbagai indikator yang sesuai. Derajat kesehatan ditentukan antara lain oleh kualitas pelayanan kesehatan. Untuk menunjuk pada derajat kesehatan biasanya menggunakan istilah status kesehatan. status kesehatan masyarakat dapat ditentukan oleh beberapa indikator representatif yang membutuhkan data. (Dr. de. Alexander Lucas Slamet Riyadi, 2016) menjelaskan bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya derajat kesehatan suatu masyarakat (H. L. Blum, Tahun 1969) antara lain :

- Faktor genetik, sistem kesehatan, perilaku dan lingkungan.
- Ukuran epidemiologis.
- Ukuran kondisi pencapaian berbagai program kesehatan.

(Agus Widiyarta, 2016) menjelaskan bahwa kesehatan ialah suatu sektor yang kompleks sehingga banyak masalah yang mungkin bersifat teknis atau yang hanya menarik ataupun akan menjadi suatu perhatian dari sekelompok orang atau masyarakat. Untuk itu peran pemerintah untuk mendorong sekelompok orang atau masyarakat untuk terlibat dalam sebuah proses pelayanan kesehatan sangat diperlukan.

Usia Rentan

Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata rentan memiliki arti mudah terjangkit penyakit atau suatu keadaan dimana sistem imun lebih peka sehingga mudah merasakan sesuatu. Namun ada beberapa pengertian lain mengenai pengertian rentan, yaitu :

1. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia, kelompok rentan adalah seseorang yang telah memiliki usia lanjut, balita, fakir miskin, ibu hamil, dan orang yang terkena Disabilitas.
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, berpendapat bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah sekelompok perempuan, anak-anak, orang yang terkena disabilitas, dan masyarakat hukum adat.
3. Sekertariat Jaringan antar Organisasi Masyarakat Sipil, Puji Pujiono. Berpendapat bahwa, kelompok yang rentan ialah sekelompok orang dengan disabilitas, kelompok minoritas, sekelompok lansia, serta masyarakat yang berada di suku asing, dan masih banyak lagi. Beliau juga berpendapat bahwa kelompok rentan merupakan kelompok orang yang dianggap paling berdampak terjadinya krisis.
4. Juru bicara pemerintah penanganan virus Covid-19, Achmad Yurianto juga berpendapat bahwa, kelompok yang rentan di masa pandemi sekarang ini adakan kelompok lansia, kelompok yang mempunyai riwayat penyakit kronis.
5. Komis Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpendapat bahwa, yang lebih rentan terkena penyakit adalah yaitu orientasi seksual, identitas gender, sekelompok minoritas ras, kelompok minoritas etnis, orang dengan disabilitas dan kelompok minoritas agama dan keyakinan.

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu)

Posyandu merupakan kepanjangan dari pos pelayanan keluarga berencana - kesehatan terpadu. Dalam sebuah posyandu tersedia beberapa aktivitas kesehatan dasar yang telah diselenggarakan pemerintah untuk para masyarakat atau penduduk yang dibantu petugas kesehatan yang terdiri dari masyarakat itu sendiri. Posyandu adalah salah satu upaya dalam bidang kesehatan yang biasanya berasal dari masyarakat yang berpartisipasi penduduk dalam upaya melakukan pelayanan kesehatan dari masyarakat, oleh masyarakat dan juga untuk masyarakat, yang sedang dilaksanakan kader kesehatan yang telah mendukung pendidikan dan pelatihan dari puskesmas mengenai pelayanan kesehatan dasar

(SEMBIRING, 2004) menjelaskan definisi dari posyandu yaitu suatu tempat untuk komunikasi dalam sebuah pelayanan kesehatan masyarakat, yang dimulai dengan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan juga untuk masyarakat itu sendiri dengan berbagai dukungan pelayanan serta sebuah pembinaan teknis dari petugas kesehatan maupun keluarga.

(Hidayat, 2012) Posyandu dibentuk berdasarkan musyawarah antar desa/kelurahan dan dikelola oleh Pengelola Posyandu, kemudian disepakati oleh kepala desa/lurah. Pembentukan posyandu sendiri sudah tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 Tahun 2007 yang berisi tentang Pedoman Pembentukan Kelompok

Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Permendagri No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk penyelenggara pelayanan kesehatan yang memudahkan daerah setempat untuk melakukan pengecekan kesehatan, khususnya bagi ibu, balita dan lansia. Untuk mewujudkan Indonesia yang sehat yang di siarkan pemerintah, maka dibutuhkan kualitas jumlah peningkatan kesehatan dapat dikontrol melalui pencapaian pelayanan tenaga kerja kepada masyarakat. Pos pelayanan terpadu atau posyandu merupakan cikal bakal penyelenggara kesehatan yang dianggap penting karena kegiatan yang dibuat dalam posyandu bertujuan untuk mempercepat adanya penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, menumbuhkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), memperluas kapasitas wilayah setempat dalam menciptakan pelayanan kesehatan dan berbagai pelatihan yang mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Tujuan dari penyelenggaraan posyandu, yaitu:

1. Menurunkan angka kematian bayi serta angka kematian ibu (ibu hamil/ nifas)
2. Membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) .
3. Meningkatkan kemampuannya masyarakat dalam mengembangkan kegiatan kesehatan serta kegiatan lainnya yang dapat menunjang untuk tercapainya suatu masyarakat sehat sejahtera.
4. dapat berfungsi sebagai pendukung gerakan keluarga sejahtera , gerakan ketahanan keluarga seta gerakan ekonomi sejahtera.

Ada juga tujuan dari posyandu lainnya yaitu :

- a) Mempercepat penurunan infant Mortality Rate (IMR), angka kematian balita dan angka kelahiran
- b) Mepercepat penerimaan NKKBS
- c) Berkembangnya suatu kegiatan-kegiatan masyarakat yang sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Kegiatan pelayanan Posyandu utamanya dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan pelayanan tersebut meliputi:

1. Kegiatan peningkatan pendidikan, pemantauan perkembangan dan pembentukan perspektif positif pada setiap tahapan siklus kehidupan manusia.
2. Peningkatan ekonomi keluarga, pemberdayaan masyarakat kurang mampu, masyarakat adat terpencil dan penyandang kesejahteraan sosial.
3. Pemantauan kesehatan Ibu dan Anak seperti pemberian Tablet Darah Plus (TDD) atau tablet zat besi, berapapun jumlahnya berkali-kali atau 90 tablet, vaksinasi TT dan Pemeriksann kehamilan (setidaknya beberapa kali selama kehamilan)

4. Pembinaan Gizi dengan melakukan pemantauan pertumbuhan melalui penimbangan bulanan, pemberian vitamin A dalam porsi tinggi (dalam jangka panjang Vitamin A diberikan khususnya pada bulan februari dan agustus), dan pemberian makanan tambahan (PMT)
5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) berupa suntik, tablet dan sejenisnya.
6. Mengadakan penyuluhan pencegahan infeksi mengenai imunisasi, lingkungan bersih, sehat dan penghindaran HIV/ AIDS, transaksi manusia dan kekerasan rumah tangga.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan yang bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis sebuah fenomena, peristiwa atau sebuah kejadian, dinamika sosial, sikap kepercayaan, serta persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana Menurut (Albi Anggito, 2018) penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan pengumpulan data pada suatu latar alamiah yang maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di desa Bakung Temenggungan kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan tempat ini dipilih berdasarkan pertimbangan adanya fenomena yang ada dan letaknya mudah dijangkau. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini di dapatkan secara langsung dengan cara wawancara , observasi, survey, maupun kuisioner. Sedangkan data sekunder di dapatkan dari berbagai sumber seperti literatur, dokumen, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan pelayanan posyandu dimasa pandemic. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan dari terhambatnya pelayanan posyandu untuk masyarakat disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 dan apa strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang telah kami peroleh melalui wawancara petugas posyandu di Desa Bakung Temenggungan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur, antara lain yaitu :

Alur pelayanan di posyandu

Berikut merupakan alur pelayanan pada posyandu menurut kementerian kesehatan Republik Indonesia :

1. Mencuci tangan dengan sabun
2. Pengecekan suhu badan yang dibantu oleh petugas posyandu
3. Pendaftaran ke petugas posyandu
4. Penimbangan berat badan yang dibantu petugas posyandu
5. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang hadir di posyandu

6. Penyuluhan yang disampaikan oleh petugas posyandu kepada masyarakat yang hadir

Sistem Pelayanan Posyandu

Dalam setiap desa pelaksanaan kegiatan posyandu dilakukan di setiap tingkat dusun. Mekanisme kerja di posyandu di Desa Bakung Temenggungan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo memberlakukan beberapa sistem, yaitu yang pertama penimbangan bayi dan balita, kedua pencatatan atau pengisian hasil melalui kartu posyandu yang telah dimiliki para peserta, yang ketiga yaitu penyuluhan perorangan yang merujuk dan juga menyebarluaskan program yang akan dilakukan, yang keempat merupakan pelayanan KB-KIA, imunisasi dan pengobatan.

Secara teknis alur pelayanan di posyandu Desa Bakung Temenggungan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo sebelum adanya pandemi Covid-19 dilakukan dengan cara datang langsung ke pos dan dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun beberapa ketentuan lain untuk datang ke posyandu, yaitu dengan membawa buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) bagi ibu dan anak yang telah terdaftar. Untuk posyandu bagi lansia sebelum adanya pandemi dilakukan pengecekan gula darah dengan tensi dalam waktu yang telah ditentukan.

Di masa pandemi Covid-19 alur pelayanan posyandu Desa Bakung Temenggungan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo lebih mengondisikan sesuai dengan anjuran pemerintah yang telah diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Adapun teknis pelayanan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan menggunakan WhatsApp grup sebagai sarana untuk membagi informasi terkait pelayanan posyandu.

Kegiatan Pelayanan posyandu diadakan secara bergilir, dengan memberikan informasi dan jadwal kegiatan yang akan dilakukan posyandu di bagikan oleh para petugas melalui aplikasi WhatsApp Grup yang beranggotakan masyarakat yang telah terdaftar di posyandu Desa Bakung Temenggungan.

Dampak pandemi Covid-19 bagi posyandu terhadap kunjungan masyarakat

Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya penurunan jumlah kunjungan masyarakat ke posyandu. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu :

1. Adanya kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah dan kementerian kesehatan.
2. Adanya Perspektif masyarakat yang takut untuk datang ke posyandu karena adanya wabah Covid-19.

Dengan terjadinya pandemi saat ini, hampir setengah dari masyarakat yang terdaftar di posyandu lebih memilih tidak hadir dalam kegiatan rutin di posyandu karena memiliki kekhawatiran terhadap virus Covid-19. Hal ini terjadi di posyandu Desa Bakung Temenggungan sebelum pandemi rata rata masyarakat yang hadir sebanyak 85 orang, namun dengan adanya pandemi ini masyarakat yang hadir rata rata hanya 45 orang.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap pelayanan posyandu

Ada pula dampak dari pandemi Covid-19 terhadap pelayanan posyandu Desa Bakung Temenggungan adalah

1. Ditiadakannya kegiatan penimbangan balita yang biasanya dilakukan dengan rutin oleh masyarakat.
2. Ditiadakannya pelayanan posyandu bagi lansia.
3. Berubahnya jadwal pelayanan posyandu.
4. Kurangnya tenaga pegawai sehingga pelayanan masih berjalan dengan lambat.

Dampak di atas merupakan, akibat dari kurang siapnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendesain kebijakan dan lemahnya dukungan sumberdaya. Olehnya itu dibutuhkan ketajaman analisis kebijakan di semua level dapat memahami masalah yang dihadapi dan memperoleh solusi alternatif pemecahan masalahnya. Untuk itu, dibutuhkan dikresi kebijakan dalam menjawab problematika pendidikan antara lain pembelajaran online bagi siswa di sekolah sebagai bentuk kebijakan publik dan dapat di implementasikan tentnya berdasarkan hail analisis sesuai data dan informasi dari berbagai sumber. Sejauhmana mana kebijakan itu efektif dan efisien di implementasikan.

Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dikutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15). "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" kebijakan publik sebagai "apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin, Alam, & Elwan, 2020)

Demikian halnya menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)

Hasilnya di masa Pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan masyarakat ke posyandu yang biasanya kunjungan bisa mencapai 85 orang perhari semenjak ada Pandemi ini kunjungan hanya berjumlah 45 orang perharinya hal ini disebabkan faktor ketakutan masyarakat akan kerumunan yang dapat menularkan virus Covid-19 dengan cepat, maka dari itu petugas posyandu Desa Bakung temenggung Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur memberlakukan program daring dengan memanfaatkan WhatsApp grub sebagai sarana informasi mengenai kegiatan yang diadakan di posyandu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah penulis paparkan, dapat di ambil kesimpulan dalam pelayanan publik yang tertuang pada UU Nomor 25 Tahun 2009 bahwa setiap negaraberkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti pelayanan publik di bidang kesehatan bahwa proses pelayanan posyandu di Ds. Bakung temenggungan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur memiliki alur dan sistem yang sesuai dengan buku pedoman umum pengelolaan posyandu. Sejak adanya pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap sistem pelayanan posyandu, dimana untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini kegiatan menimbang balita dan posyandu lansia (lanjut usia) di tiadakan karena untuk mengantisipasi adanya kerumunan berlebih yang berpotensi mudahnya penyebaran virus Covid-19.

REFERENSI

- Ibrahim, H. A. (2019). Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya.
- Hidayat, T. S., & Jahari, A. B. (2012). Perilaku pemanfaatan posyandu hubungannya dengan status gizi dan morbiditas balita. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 40(1), 1-10.
- Muhammad Elwan, La Ode. "Problem Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muna." *Journal Publicuho*, vol. 2, no. 2, 2019, pp. 31-42, doi:10.35817/jpu.v2i2.7223.
- Nain, U. (2015). Posyandu: upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- Ryadi, A. L. S. (2016). Ilmu kesehatan masyarakat. Penerbit Andi.
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., & Bahri, S. (2020). Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis.
- Sembiring, N. (2004). Posyandu sebagai saran peran serta masyarakat dalam usaha peningkatan kesehatan masyarakat. Universitas Sumatera Utara, USU Digital Library.
- Sholihah, N., & Kusumadewi, S. (2015). Sistem informasi posyandu kesehatan ibu dan anak. *Prosiding SNATIF*, 207-214.
- Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>
- Widiyarta, A., & Nawangsari, E. R. (2016). Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governance (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Dasar Kesehatan Di Kota Surabaya). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1).